

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia, karena pendidikan memberikan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal tersebut bisa diperoleh melalui pendidikan formal, informal dan nonformal. Sehingga pengertian pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan agama.

Selanjutnya, pendidikan dapat dikatakan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat. Pemerintah negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang baik dan bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa ada pengecualian termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Dewasa ini peran lembaga pendidikan sangat menunjang bagaimana tumbuh kembang dalam berolah system maupun cara bergaul dengan orang lain. Selain itu lembaga pendidikan tidak hanya sebagai wahana untuk system bekal ilmu pengetahuan, namun juga sebagai lembaga yang dapat memberi skill atau bekal untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat didalam masyarakat.

Sementara itu lembaga pendidikan tidak hanya di tunjukkan kepada anak yang memiliki kelengkapan fisik, tetapi juga kepada anak yang memiliki keterbelakangan mental. Mereka dianggap sosok yang tidak berdaya, sehingga

perlu di bantu dan di kasihani untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu di sediakan berbagai bentuk layanan pendidikan atau sekolah bagi mereka.

Pada dasarnya pendidikan untuk berkebutuhan khusus sama dengan pendidikan anak- anak pada umumnya. Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Sekolah merupakan contoh dari lembaga pendidikan yang bersifat formal dan memiliki peran sangat penting. Sekolah tidak hanya sebagai wahana untuk mencari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai tempat yang dapat memberi bekal keterampilan untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Di sekolah anak juga dibimbing untuk bersosialisasi dengan orang lain. Keberadaan sekolah tidak saja penting bagi anak normal, melainkan bermanfaat pula untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan kekurangan ketika harus berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat dijadikan wadah bagi setiap anak untuk memahami keberagaman.

Pendidikan sebagai hak untuk semua anak telah tercantum dalam berbagai instrumen internasional mulai dari Deklarasi Universal 1948. Hak untuk memperoleh pendidikan di dalam sistem pendidikan umum dan tidak didiskriminasikan telah disorot dalam instrumen-instrumen yang lebih rinci seperti deklarasi Jomtien dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan yang secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan pada bulan Juni 1994 bahwa “prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersamasama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.”

Pendidikan inklusif lahir dari perubahan trend dalam kebijakan sosial dan perubahan paradigma sistem pendidikan di beberapa negara di dunia. Lahirnya pendidikan inklusif sejalan dengan deklarasi PBB mengenai Hak Azasi Manusia

(HAM), yaitu hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang dalam pendidikan. Keberadaan pendidikan inklusif juga didukung oleh deklarasi yang disepakati oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, antara lain adalah pernyataan Salamanca tahun 1994 mengenai hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengakuan terhadap perbedaan minat, kemampuan, dan kebutuhan dalam belajar.

Deklarasi Bandung yang menyatakan kesiapan Indonesia menuju inklusi. Pada Deklarasi Bandung tahun 2004 dijelaskan bahwasanya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia pendidikan inklusif dipayungi oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19/2007 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya secara operasional di lapangan didukung oleh Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Menurut Alfian (2013, hlm. 70) menyatakan bahwasanya pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mempersatukan layanan PLB dengan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan atau penempatan semua ALB di sekolah biasa. Dengan pendidikan inklusif semua anak luar biasa dapat bersekolah di sekolah terdekat dan sekolah yang menampung semua anak. Dalam konsep pendidikan luar biasa, pendidikan inklusif diartikan sebagai penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan yang dipersatukan. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi siswa luar biasa atau berkelainan dalam makna dikaruniai keunggulan (*gifted and talented*) maupun berkelainan karena adanya hambatan fisik, sensorik, motorik, intelektual, emosi, dan/atau sosial.

Manfaat yang dapat diambil dari adanya pendidikan inklusif dan sekolah inklusif ini adalah dapat membantu peserta untuk mengembangkan sikap empatinya. Sikap empati menurut Faizah, dkk. (2017, hlm. 1) menyatakan

pengertian empati adalah kemampuan menempatkan diri kita pada diri orang lain, bahwa kita telah memahami bagaimana perasaan orang lain tersebut, dan apa yang menyebabkan reaksi mereka tanpa emosi kita terlarut dalam emosi orang lain.

Pada saat ini dengan kemajuan teknologi yang pesat tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif pada perkembangan anak, terutama rasa empati anak. Pada saat ini semua orang dimulai dari orang dewasa sampai usia anak-anak tidak akan jauh dari teknologi terutama gawai. Dengan bantuan gawai dapat lebih mudah untuk mendapatkan suatu informasi, berita, gambar, atau video yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, yangmana hal ini dapat memberikan dampak bagi para penggunanya jika tidak digunakan secara bijaksana, terutama dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap anak-anak yang menggunakannya tanpa pendampingan orang tua. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan gawai yang kurang bijaksana terutama pada anak-anak ialah salah satunya dapat menumpulkan rasa empati pada anak karena anak akan terbiasa melihat bahkan bermain dengan unsur-unsur kekerasan. Akibatnya berbagai kekerasan seperti memukul, menembak atau membunuh akan dianggap sebagai hal yang wajar.

Menurut data Komnas Perlindungan Anak (dalam Priliawito & Ruqoyah, 2012) jumlah tawuran pelajar sudah memperlihatkan kenaikan pada enam bulan pertama tahun 2012. Hingga bulan Juni, sudah terjadi 139 tawuran kasus tawuran di wilayah Jakarta. Sebanyak 12 kasus menyebabkan kematian. Sementara pada 2011, ada 339 kasus tawuran menyebabkan 82 anak meninggal dunia. Dengan adanya data tersebut, maka fokus pihak sekolah tidak boleh lagi hanya mengajarkan pembelajaran yang berbasis transfer of knowledge tetapi juga transfer of value. Hal tersebut akan membantu terbentuknya karakter pada siswa salah satunya adalah empati.

Berdasarkan berita diatas dapat diketahui bahwa pada saat ini khususnya dalam dunia pendidikan banyak sekali kejadian-kejadian yang dapat mencoreng nama baik pendidikan Indonesia. Namun lebih terpenting dari nama baik pendidikan Indonesia ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana penurunan moral yang ada dalam peserta didik selain moral mereka juga telah kehilangan rasa saling menghargai, menghormati bahkan sikap empati dan sikap simpati

peserta didik. Untuk menangani hal tersebut dan menjaga supaya pendidikan Indonesia tetap baik maka pendidikan kewarganegaraan yang mana merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dipersekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan karakter peserta didik baik yang inklusi maupun peserta didik reguler.

Pembentukan karakter peserta didik merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua dan pendidik. Orang tua membentuk karakter anaknya dalam lingkup kehidupan di rumah, sedangkan pendidik memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didiknya dengan memberikan pemahaman dan penghayatan tentang nilai-nilai karakter yang baik sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (Tulus dalam Desti, 2017, hlm.129) dan Lickona (dalam Desti, 2017, hlm.129) juga menyatakan bahwa orang tua dan pendidik memiliki tugas untuk mengajarkan karakter pada siswa.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan warganegara yang baik (*good citizen*), yaitu warganegara yang cinta tanah air, memiliki jiwa patriotisme, dan juga memiliki rasa kekeluargaan yang diwujudkan dengan sikap disiplin, jujur, serta toleransi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan wajib diberikan kepada semua warganegara tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus pada semua jenjang pendidikan dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Melalui program sekolah inklusif diharapkan mampu melaksanakan tujuan pendidikan kewarganegaraan tersebut, yakni dapat menjadikan dan membentuk warga negara yang baik dan cerdas, baik secara intelektualitas, emosional, sosial dan spiritual yang akan menjadi orientasi dasar sebagai seorang manusia agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan didukung oleh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakannya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta menunjukan sikap sosial yang baik khususnya sikap empati terhadap sesama manusia.

Sapriya (dalam Winarno, 2013 hlm. 7) mengungkapkan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian yang bersifat multidisiplin mengambil peran tidak hanya sebagai pendidikan politik, tetapi juga berperan sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan hukum dan pendidikan bela negara”. Hal ini

mengisyaratkan bahwa misi Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mencakup ilmu kewarganegaraan, tetapi juga mencakup politik, nilai dan moral serta hukum yang saling terintegrasi dalam menunjang pembentukan karakter warga negara yang baik dan cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sikap empati merupakan suatu kebajikan manusia kepada manusia lain yang harus terus dipelihara supaya dapat bersatu tanpa ada perpecahan sehingga keutuhan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia menjadi tetap utuh dan bersama. Dari pernyataan-pernyataan tersebut menyatakan bahwa program sekolah inklusif terdapat kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Maka dari itu dengan adanya Program Sekolah Inklusif yang dilaksanakan di sekolah SMA Negeri 4 Bandung diharapkan dapat mengembangkan sikap empati peserta didik sehingga dapat hidup bermasyarakat dengan baik serta akan menjadi warga negara yang baik. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Studi Tentang Program Sekolah Inklusif dalam Membangun Sikap Empati Peserta Didik (Studi Deskriptif di SMA Negeri 4 Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perencanaan pelaksanaan program sekolah inklusif di SMA Negeri 4 Bandung?
- 2) Bagaimana proses pelaksanaan program sekolah inklusif di SMA Negeri 4 Bandung?
- 3) Bagaimana dengan diterapkannya program sekolah inklusif dapat membangun sikap empati peserta didik di SMA Negeri 4 Bandung?
- 4) Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan program sekolah inklusif di SMA Negeri 4 Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan pada penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara faktual dan aktual mengenai upaya membangun sikap empati peserta didik dengan adanya program sekolah inklusif di SMA Negeri 4 Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Perencanaan program sekolah inklusif di SMA Negeri 4 Bandung
- 2) Proses pelaksanaan Program Sekolah Inklusif dalam membangun sikap empati peserta didik di SMA Negeri 4 Bandung
- 3) Penerapan program sekolah inklusif dapat membangun sikap empati peserta didik di SMA Negeri 4 Bandung
- 4) Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan program sekolah inklusif di SMA Negeri 4 Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik bagi diri pribadi maupun bagi khalayak. Adapun beberapa manfaat yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat/Signifikansi dari Segi Teoritis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atas sumbangan dalam kajian pendidikan kewarganegaraan khususnya yang berkaitan dengan upaya membangun sikap empati peserta didik dengan adanya Program sekolah Inklusi di SMA Negeri 4 Bandung. Sehingga secara tidak langsung juga Penelitian dapat memberikan andil terhadap keilmuan PKn terutama bagi mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral, Kebijakan Publik, Sistem Pemerintahan Daerah, Belajar dan Pembelajaran PKn serta materi-materi lainnya terkait pendidikan berkarakter bagi peserta didik.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi dari Segi Kebijakan

Dengan adanya penelitian tentang Program Sekolah Inklusi dalam membangun sikap empati peserta didik di SMA Negeri 4 Bandung ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada pemerintah, sekolah-sekolah dan Dinas

Pendidikan Indonesia mengenai program sekolah Inklusi yang dapat membangun sikap empati peserta didik. Melalui Program Sekolah Inklusi dapat membangun sikap empati peserta didik dimana peserta didik dapat berinteraksi antara peserta didik yang normal dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang mana dapat membangun sikap empati dalam keberagaman peserta didik.

1.4.3 Manfaat/Signifikansi dari segi Praktis

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- 1) Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan tambahan ilmu dan referensi dalam memahami pentingnya kesetaraan dalam layanan pendidikan antara anak-anak yang normal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga terciptanya sikap empati antar sesama.
- 2) Bagi Guru dapat dijadikan bahan salah satu pengkajian dan acuan guru dalam menilai afektif peserta didik dalam salah satunya dengan cara membangun sikap empati peserta didik melalui Program Sekolah Inklusi ini.
- 3) Bagi peserta didik dapat meningkatkan sikap empati terhadap sesama, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati terhadap sesama khususnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat mendapatkan kesetaraan dalam pelayanan pendidikan dengan anak-anak yang normal.
- 4) Bagi sekolah inklusi dapat dijadikan sebagai wujud partisipasi sekolah terhadap program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menyetarakan tanpa ada perbedaan dalam layanan pendidikan di Indonesia serta dapat memupuk persatuan dalam keberagaman sehingga akan membangun sikap empati peserta didik.

1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan pencerahan pengalaman hidup dengan memberikan gambaran tentang program sekolah inklusi dalam membangun sikap empati peserta didik yang mampu diimplementasikan kembali dalam bentuk sikap saling menghargai dalam proses pembelajaran maupun diluar pembelajaran.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran.

BAB I Pendahuluan, sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, meto de dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan

BAB IV Temuan dan Pembahasan, pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Penulis memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini

dapat memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.